

## EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nahdatul Ilma<sup>1</sup>, Agus Sya'bani Arlan<sup>2</sup>, Saidah Hasbiyah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik  
e-mail: [nahdatulilma@gmail.com](mailto:nahdatulilma@gmail.com)

### ABSTRAK

Pendekatan kualitatif digunakan untuk membangun pengetahuan melalui interpretasi berdasarkan perspektif konstruktif atau partisipatoris, dengan sumber data seperti catatan observasi, wawancara, pengalaman individu, dan sejarah. Moleong (Murdiyanto, 2022) mendefinisikan pendekatan ini sebagai cara memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi berbentuk kata-kata dalam konteks alami dengan metode ilmiah. Sementara itu, Saryono (Nasution, 2023) menyebut penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, dimulai dari data yang ada dan menghasilkan teori. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan analisis induktif untuk mengkaji individu, fenomena, simbol, dokumen, serta gejala sosial. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan populasi, situasi, atau fenomena secara sistematis, menjawab pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana, tanpa memanipulasi variabel (Rita Fiantika et al., 2022). Metode pemungutan pajak hiburan melibatkan prosedur seperti sistem elektronik dan pendekatan langsung guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target. Sosialisasi program melalui media sosial, brosur, dan seminar di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum maksimal, memengaruhi efektivitas program. Pengawasan rutin terhadap SOP, kinerja petugas, dan sistem teknologi telah dilakukan, namun terkendala rendahnya kesadaran wajib pajak dan terbatasnya objek pajak. Teknologi diusulkan untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan partisipasi. Penyelesaian pekerjaan dilakukan dengan langkah sistematis, seperti pencatatan digital dan penerimaan pembayaran, yang cukup efektif tetapi masih memerlukan penyesuaian. Elemen metode, sosialisasi, pengawasan, dan penyelesaian pekerjaan mendukung efektivitas sesuai teori Efektivitas oleh Siagian (Wijaya, 2020:18).

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pemungutan, Pajak

### ABSTRACT

*Qualitative approaches are used to build knowledge through interpretation based on constructive or participatory perspectives, with data sources such as observation notes, interviews, individual experiences, and history. Moleong (Murdiyanto, 2022) defines this approach as a way of understanding phenomena experienced by research subjects holistically through descriptions in the form of words in a natural context with scientific methods. Meanwhile, Saryono (Nasution, 2023) said that qualitative research is used to investigate, describe, and explain the quality of social influence that cannot be measured quantitatively, starting from existing data and producing theories. This research is descriptive, using inductive analysis to examine individuals, phenomena, symbols, documents, and social symptoms. Descriptive research aims to describe populations, situations, or phenomena systematically, answering questions such as what, where, when, and how, without manipulating variables (Rita Fiantika et al., 2022). The entertainment tax collection method involves procedures such as electronic systems and direct approaches to improve taxpayer compliance and target achievement. Program socialization through social media, brochures, and seminars in Hulu Sungai Utara Regency has not been optimal, affecting the effectiveness of the program. Routine supervision of SOPs, officer performance, and technology systems has been carried out, but is constrained by low taxpayer awareness and limited tax objects. Technology is proposed to facilitate reporting and increase participation. Completion of work is carried out with systematic steps, such as digital recording and payment receipts, which are quite effective but still require adjustment. Elements of method, socialization, supervision, and completion of work support effectiveness according to the Effectiveness theory by Siagian (Wijaya, 2020:18).*

**Keywords:** Effectiveness, Collection, Tax

## PENDAHULUAN

Pajak daerah memainkan peran vital dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah, karena menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan pajak yang maksimal dapat memperkuat anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan peraturan yang menyesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing.

Salah satu regulasi terkait pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Regulasi ini mencakup berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak hiburan, yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui proses yang adil, transparan, dan efektif.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi besar di sektor hiburan, yang terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas seperti konser musik, bioskop, tempat bermain, dan acara budaya menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Potensi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor hiburan. Pajak hiburan menjadi salah satu sumber strategis pendapatan daerah, terutama karena tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas hiburan di wilayah tersebut.

Namun, pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka, pengawasan yang kurang efektif, mekanisme pemungutan yang belum sepenuhnya didukung teknologi modern, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggar. Hal-hal tersebut menyebabkan potensi pendapatan pajak dari sektor hiburan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak hiburan. Untuk meningkatkan penerimaan, berbagai langkah perlu diambil, baik dari sisi internal organisasi maupun melalui kolaborasi eksternal. Penggunaan teknologi informasi, seperti penerapan aplikasi pajak online, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran serta membantu pemerintah dalam memonitor arus pajak yang masuk. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor hiburan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas pengelolaan pajak hiburan suatu daerah dapat diukur dari pencapaian target pendapatan dan efisiensi sistem yang diterapkan. Dalam hal ini, BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan di tengah berbagai hambatan yang ada. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pajak hiburan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengevaluasi kebijakan dan strategi yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi optimalisasi penerimaan pajak hiburan.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Minimnya Sosialisasi Kewajiban Pajak Hiburan

Sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak hiburan kepada pelaku usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami aturan serta prosedur pembayaran pajak hiburan. Kondisi ini menyebabkan banyak yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai manfaat pajak hiburan dalam mendukung pembangunan daerah turut menurunkan kesadaran dan tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak.

### 2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran para pelaku usaha hiburan terhadap pentingnya pembayaran pajak masih rendah. Banyak yang memandang kewajiban pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan

operasional usaha mereka. Hal ini diperparah dengan pemahaman yang minim terhadap kontribusi pajak dalam pembangunan daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh upaya sosialisasi yang belum merata dan efektif. Akibatnya, potensi pendapatan dari pajak hiburan belum maksimal, sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan strategis.

### 3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelanggaran pajak hiburan masih terbatas, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam melakukan tindakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran ini mengakibatkan rendahnya efek jera, sehingga praktik penghindaran pajak tetap berlangsung. Selain itu, tidak adanya himbauan atau tindakan preventif untuk mendorong kepatuhan masyarakat memperburuk situasi ini.

Setiap organisasi berupaya untuk mencapai keberhasilan, menciptakan kesejahteraan bagi para pegawai, dan memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu konsep penting dalam menilai kinerja manajemen adalah efektivitas. Menurut Robbins (dalam Tika), efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Ekosusilo dan Kasihadi (dalam Abdurrahman, 2022:17) menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan sejauh mana rencana yang telah dibuat dapat terealisasi. Semakin banyak rencana yang terlaksana, maka semakin tinggi tingkat efektivitas kegiatan tersebut. Selain itu, Tyson dan Jackson menambahkan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Mereka menjelaskan bahwa dasar efektivitas terletak pada integrasi berbagai elemen utama organisasi, seperti pengetahuan, sumber daya non-manusia, proses manusiawi, strategi, dan struktur organisasi.

Sedarmayanti (dalam Abdurrahman, 2022:18) mendefinisikan efektivitas sebagai proses pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk menghasilkan hasil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sementara itu, Bernard (dalam Ahyari) menguraikan efektivitas dari perspektif pencapaian tujuan, yaitu sejauh mana sasaran yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Tingkat pencapaian sasaran tersebut menjadi indikator dari tingkat efektivitas organisasi.

Keefektifan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menentukan tujuan yang tepat serta memilih media atau sarana yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang pemimpin yang efektif mampu mengidentifikasi pekerjaan yang perlu dilakukan serta metode yang paling tepat untuk meraih tujuan. Dengan demikian, keefektifan erat kaitannya dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

Misalnya, keefektifan kerja seorang pegawai dinilai baik ketika tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Etzioni, yang mengartikan keefektifan sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komariah dan Triatna juga menyatakan bahwa teori tentang keefektifan pada umumnya berorientasi pada pencapaian tujuan.

Pandangan lain disampaikan oleh Cheng, yang mendefinisikan keefektifan organisasi sebagai kemampuan untuk memenuhi berbagai tujuan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan mempertahankan eksistensinya. Menurut Cheng, keefektifan organisasi mencerminkan kemampuannya untuk tetap bertahan dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang telah dirumuskan.

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berarti menghasilkan efek atau akibat yang diharapkan dari suatu tindakan (Hasibuan, 2022:132). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti mampu memberikan hasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gill Mc.E (2022:132) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang benar atau menggunakan sarana yang tepat guna mencapai tujuan tersebut.

Kamarudin menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan manajemen

dalam melaksanakan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Kamarudin, 2022:132). Sementara itu, menurut Gill Mc.E (2022:133), efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dalam waktu yang telah ditentukan.

Richard M. Steers (2022:133) menyatakan bahwa beragam pandangan mengenai efektivitas organisasi dapat menyebabkan perbedaan pendapat tentang cara meningkatkan efektivitas dalam organisasi yang sedang berjalan. Berbagai konsep efektivitas seringkali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga mempengaruhi upaya pencapaiannya.

Menurut Beni (2020:27), efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan organisasi, atau dapat dikatakan sebagai ukuran sejauh mana keluaran, kebijakan, dan prosedur organisasi mendukung keberhasilan. Efektivitas juga berkaitan dengan keberhasilan operasi sektor publik, di mana kegiatan dinilai efektif jika memberikan dampak besar terhadap penyediaan layanan masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2020:28) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi hasil (output) program terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang dirancang, semakin tinggi tingkat efektivitas organisasi tersebut. Efektivitas organisasi ditentukan oleh sejauh mana dampak (outcome) yang dihasilkan dari keluaran program.

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa pemahaman efektivitas berbeda-beda tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Efektivitas kerja karyawan menjadi dasar keberhasilan organisasi karena kinerja individu yang efektif akan berdampak pada efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok, pada gilirannya, berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

H. Emerson (dalam Soewarno Handyaningrat, 2022:134) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dirancang. T. Hani Handoko menambahkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat dan memilih metode yang sesuai untuk mencapainya. Seorang manajer yang efektif mampu memilih tugas atau cara yang paling tepat untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat ditingkatkan melalui berbagai mekanisme yang dirancang dan dijalankan oleh seorang pemimpin. Beberapa mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Penetapan Tujuan Strategis

Efektivitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menentukan tujuan serta mengelola sumber daya untuk mencapainya. Proses penetapan tujuan melibatkan identifikasi sasaran utama organisasi dan bagaimana setiap kelompok atau individu dapat berkontribusi pada pencapaian tersebut. Ketika tujuan bersama ditetapkan dengan jelas, semangat kerja dan usaha dari anggota organisasi cenderung meningkat.

#### 2. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya yang efektif mencakup beberapa aspek penting:

- a. Koordinasi Sub-Sistem: Mengintegrasikan berbagai bagian organisasi untuk memastikan setiap sub-sistem memiliki sumber daya yang cukup demi melaksanakan tugasnya. Koordinasi yang baik meminimalkan energi yang terbuang dan meningkatkan efisiensi.
- b. Pelaksanaan Kebijakan: Menerapkan dan memelihara kebijakan yang mendukung efektivitas organisasi, memaksimalkan hasil dari keputusan masa lalu, dan meminimalkan pemborosan serta duplikasi fungsi.
- c. Sistem Umpan Balik: Menggunakan umpan balik secara terstruktur untuk memastikan organisasi tetap fokus pada tujuannya.

#### 3. Lingkungan Kerja yang Mendukung Prestasi

Lingkungan kerja yang baik memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin perlu merancang lingkungan kerja yang memungkinkan staf bekerja secara optimal,

sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

#### 4. Proses Komunikasi

Komunikasi yang efektif dalam organisasi membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan di kalangan anggota. Dengan sistem komunikasi yang baik, pengumpulan serta penyebaran informasi dapat ditingkatkan, sehingga membantu pengambilan keputusan menjadi lebih baik.

#### 5. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

- a. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Beberapa cara meningkatkan efektivitas kepemimpinan meliputi:
- b. Memastikan seleksi dan penempatan manajer yang tepat.
- c. Meningkatkan kompetensi pemimpin melalui pendidikan dan pelatihan, meskipun hasilnya bisa bervariasi.
- d. Menyusun sistem insentif bagi pemimpin untuk mendorong mereka fokus pada tujuan organisasi.
- e. Memberikan insentif kepada karyawan untuk mendukung usaha pencapaian tujuan.

#### 6. Adaptasi dan Inovasi Organisasi

Organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Pemimpin berperan penting dalam mendorong organisasi untuk terus beradaptasi dan berinovasi guna menghadapi tantangan baru (Steers, 2022:136).

Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada manusia sebagai penggerakannya. Pegawai yang efektif memainkan peran krusial dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan program organisasi. Efektivitas, pada dasarnya, mencerminkan hasil atau dampak yang sesuai dengan harapan.

Menurut S. Coot (dikutip oleh Steers, 2022:136), ada tiga kriteria utama untuk mengukur efektivitas organisasi:

1. Model Sistem Rasional: Berfokus pada produksi dan efisiensi.
2. Model Sistem Lama: Menitikberatkan pada moral dan kekompakan anggota organisasi.
3. Model Sistem Terbuka: Menekankan kemampuan organisasi dalam memperoleh sumber daya serta beradaptasi dengan lingkungannya.

Pendidikan dan pelatihan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan kemampuan yang terus ditingkatkan, pegawai dapat membantu organisasi mencapai tujuannya secara efisien.

Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada negara yang sifatnya diwajibkan berdasarkan aturan hukum. Pajak dikenakan tanpa adanya manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak sebagai imbal balik, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan umum negara. Definisi ini kemudian disesuaikan menjadi sebagai berikut: pajak adalah pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara untuk mendukung pembiayaan rutin, dengan surplusnya dialokasikan sebagai tabungan publik yang menjadi sumber utama pendanaan investasi publik.

Ada berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah, yang dikelompokkan berdasarkan sifat, lembaga pemungut, objek, serta subjek pajak.

#### 1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya:

##### a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak ini hanya dikenakan ketika terjadi peristiwa tertentu. Artinya, pajak ini tidak dipungut secara berkala, tetapi berdasarkan aktivitas tertentu yang memicu kewajiban pembayaran pajak. Contoh: pajak penjualan barang mewah yang berlaku ketika barang mewah tersebut dijual.

##### b. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung dipungut secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar tertera dalam surat tersebut. Pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus dibayar oleh

orang yang dikenai pajak. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya berlaku untuk masyarakat di wilayah tersebut, baik yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Tingkat I. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara dipungut oleh pemerintah pusat melalui lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kantor-kantor inspeksi pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek dan Subjeknya:

a. Pajak Objektif

Penggolongan pajak ini didasarkan pada objeknya. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, dan bea masuk.

b. Pajak Subjektif

Pajak ini dikelompokkan berdasarkan subjek yang dikenakan pajak. Contoh: pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

## METODE

Pendekatan kualitatif digunakan untuk membangun pengetahuan melalui interpretasi berdasarkan perspektif konstruktif atau partisipatoris, dengan sumber data seperti catatan observasi, wawancara, pengalaman individu, dan sejarah. Moleong (Murdiyanto, 2022) mendefinisikan pendekatan ini sebagai cara memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi berbentuk kata-kata dalam konteks alami dengan metode ilmiah. Sementara itu, Saryono (Nasution, 2023) menyebut penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, dimulai dari data yang ada dan menghasilkan teori. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan analisis induktif untuk mengkaji individu, fenomena, simbol, dokumen, serta gejala sosial. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan populasi, situasi, atau fenomena secara sistematis, menjawab pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana, tanpa memanipulasi variabel (Rita Fiantika et al., 2022).

## PEMBAHASAN

1. Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada segala elemen yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, baik dari aspek tenaga kerja, anggaran, maupun teknologi yang digunakan. Faktor-faktor ini menjadi kunci untuk memastikan kegiatan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan maksimal. Keberhasilan pemungutan pajak hiburan sangat bergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya yang ada, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran sentral dalam keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Ketersediaan pegawai yang terlatih dan kompeten dalam mengoperasikan sistem serta memahami prosedur akan sangat berpengaruh pada layanan yang diberikan kepada masyarakat. Petugas yang terampil dalam mengatasi masalah teknis dan yang mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat akan lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Lebih jauh lagi, adanya sikap profesionalisme dan responsif dari SDM akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. Pelatihan berkala juga sangat penting untuk memastikan bahwa petugas siap

menghadapi berbagai tantangan dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Hulu Sungai Utara, yang didukung oleh SDM yang kompeten, telah menunjukkan kemajuan yang positif. (Sumber: Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara). Ini sejalan dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18), yang menyatakan bahwa indikator Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan elemen penting dalam pelaksanaan setiap tugas organisasi, termasuk dalam peningkatan kinerja pegawai. Anggaran yang cukup memungkinkan organisasi untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti komputer, kendaraan operasional, dan teknologi yang mendukung lainnya, yang berdampak langsung pada efisiensi kerja. Selain itu, pengalokasian anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai juga sangat vital. Dengan adanya dana yang cukup, pegawai dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Manajemen anggaran yang baik dan tepat sasaran juga sangat penting agar penggunaan dana sesuai dengan prioritas dan tidak terjadi pemborosan.

Namun, pengelolaan anggaran untuk pemungutan pajak hiburan di Hulu Sungai Utara masih terbatas. Belum ada alokasi dana yang khusus untuk sektor ini, yang menjadi indikator bahwa efektivitas pelaksanaan program dapat terhambat. Ini bertentangan dengan teori Efektivitas Siagian (Wijaya, 2020:18) yang menyatakan bahwa sumber daya anggaran sangat berpengaruh pada keberhasilan pemungutan pajak hiburan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah elemen fundamental dalam mendukung keberhasilan suatu program, termasuk pelaksanaan pembayaran pajak hiburan. Sarana mencakup fasilitas fisik seperti komputer, perangkat jaringan, dan koneksi internet yang diperlukan untuk memproses pembayaran secara online. Sementara itu, prasarana mencakup sistem informasi yang terintegrasi, seperti aplikasi pembayaran pajak hiburan, yang harus berfungsi dengan baik. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat informasi, loket pelayanan, dan tanda petunjuk juga sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses layanan ini dengan lebih mudah.

Sarana dan prasarana yang ada di Hulu Sungai Utara sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas pemungutan pajak, namun perkembangan fasilitas berbasis teknologi masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penerapan sarana dan prasarana yang memadai mendukung efektivitas pelaksanaan pajak hiburan, sesuai dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18).

## 2. Jumlah dan Mutu

Jumlah dan mutu merujuk pada kesesuaian jumlah serta kualitas sumber daya yang tersedia dalam mendukung proses pemungutan pajak hiburan. Pemilihan jumlah petugas yang tepat dan berkualitas tinggi akan berdampak signifikan pada efektivitas pelaksanaan. Kualitas petugas diukur dari kemampuan mereka dalam memahami ketentuan yang ada, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, serta menguasai keterampilan teknis untuk mengoperasikan sistem pembayaran yang digunakan.

a. Penyelesaian Pekerjaan

Penyelesaian pekerjaan dalam pelaksanaan pembayaran pajak hiburan mengacu pada proses menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan terkait pembayaran denda secara digital, dari awal hingga tuntas. Hal ini meliputi kecepatan dan ketepatan dalam mengelola data pelanggar, mengikuti prosedur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memastikan dana yang dibayarkan diterima dengan benar oleh kas negara. Keberhasilan

penyelesaian pekerjaan bergantung pada koordinasi yang baik antara petugas, kehandalan sistem pembayaran pajak hiburan, serta kecepatan dalam mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Fokus utama dalam efektivitas penyelesaian pekerjaan tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan utama, yakni menyediakan pelayanan yang efisien, cepat, dan transparan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemungutan pajak hiburan sudah cukup efektif meskipun terdapat sejumlah tantangan. Proses pemungutan dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang terbatas serta sedikitnya tempat hiburan, sehingga pemungutannya lebih terfokus. Berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, pembaruan data wajib pajak, dan lokasi usaha yang jauh, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan lebih serius.

Hal ini konsisten dengan teori Efektivitas yang diajukan oleh Siagian (Wijaya, 2020:18) tentang indikator penyelesaian pekerjaan yang berhubungan dengan efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### b. Tujuan

Tujuan dari penerapan program pembayaran pajak hiburan adalah menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran denda atas pelanggaran lalu lintas tanpa perlu pergi ke kantor penegak hukum atau kejaksaan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Tujuan lain dari program ini adalah untuk mengurangi praktik pungutan liar (pungli), serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam membayar denda. Program ini juga bertujuan untuk memodernisasi sistem penegakan hukum dalam sektor lalu lintas dan meningkatkan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.

Tujuan program ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pemungutan pajak hiburan.

Pandangan ini sejalan dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18), di mana indikator tujuan memainkan peran penting dalam efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 3. Batas Waktu

#### a. Batas Waktu

Batas waktu dalam konteks pemungutan pajak berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Efektivitas pemungutan tercapai bila setiap tahapan dalam proses berlangsung tepat waktu, mulai dari sosialisasi kepada pelaku usaha hiburan, tahap penagihan, hingga pencatatan hasil pemungutan pajak tersebut. Ketepatan waktu merupakan aspek yang sangat penting karena memastikan bahwa pendapatan dari pajak hiburan dapat terdistribusi dengan baik, sesuai target yang telah ditetapkan.

Pajak hiburan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas waktu yang jelas dan telah diatur dengan baik. Meskipun demikian, beberapa kendala administratif dan keterlambatan pemberitahuan masih ditemui oleh pelaku usaha terkait pengurusan pajak ini.

Pandangan ini selaras dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18), yang menyatakan bahwa batas waktu merupakan salah satu indikator penting dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### b. Target Pencapaian

Target pencapaian dalam implementasi sistem pembayaran pajak hiburan mengacu pada hasil yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, target utama adalah meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem pembayaran pajak hiburan, terciptanya mekanisme pembayaran denda yang efisien dan transparan, serta berkurangnya praktik pungutan liar. Selain itu, program ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban membayar denda pelanggaran lalu lintas melalui pendekatan penegakan hukum yang lebih modern dan berbasis teknologi. Keberhasilan dalam mencapai target ini menunjukkan efektivitas penerapan sistem pembayaran pajak hiburan sebagai solusi berbasis teknologi dalam pelayanan publik.

Realisasi target pencapaian terkait pemungutan pajak hiburan dari tahun sebelumnya sudah tercapai dengan baik dan terbukti efektif.

Hal ini juga sesuai dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18), yang menyatakan bahwa pencapaian target merupakan indikator yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak hiburan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### 4. Metode

Metode merujuk pada pendekatan dan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Pemilihan metode yang sesuai dengan kondisi lapangan sangat penting dalam menjamin kelancaran pemungutan pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan pajak. Untuk pemungutan pajak hiburan, metode yang dapat diterapkan antara lain penggunaan sistem berbasis elektronik, sistem layanan terpadu, atau pendekatan langsung terhadap pelaku usaha. Sebuah metode yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pencapaian target pendapatan.

##### a. Sosialisasi

Sosialisasi memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang prosedur dan keuntungan dari program pembayaran pajak hiburan, termasuk tahapan pembayaran denda yang dilakukan secara digital. Sosialisasi ini dapat dilakukan menggunakan berbagai saluran informasi, seperti media sosial, publikasi melalui brosur, spanduk, atau melalui kegiatan seminar yang melibatkan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi adalah agar masyarakat lebih paham dan merasa dibantu dalam memanfaatkan layanan pembayaran pajak hiburan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program ini. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sosialisasi terkait pajak hiburan belum dilakukan secara optimal.

Hal ini kurang sesuai dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18) yang menunjukkan bahwa indikator sosialisasi berperan penting dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

##### b. Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan program pembayaran pajak hiburan berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan untuk mengevaluasi pencapaian target. Proses ini mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan SOP, kinerja petugas, serta pengawasan terhadap keandalan sistem teknologi yang digunakan. Pengawasan yang baik bertujuan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang serta gangguan teknis yang bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pada penerapan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengawasan terhadap pajak hiburan masih dihadapkan pada masalah kesadaran masyarakat yang rendah dalam melaporkan usaha hiburan dan terbatasnya jumlah objek pajak yang terdaftar. Meskipun pengawasan telah dilakukan, masih banyak pengusaha hiburan yang meminta perbaikan, terutama dalam penerapan teknologi untuk mempermudah pelaporan pajak. Pencapaian target pajak tahunan juga belum mencapai tingkat yang optimal, menuntut adanya usaha lebih dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Hal ini cukup sesuai dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18), yang menyatakan bahwa indikator pengawasan juga berhubungan dengan efektivitas pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Metode Penyelesaian Pekerjaan

Metode penyelesaian pekerjaan dalam pemungutan pajak hiburan mengacu pada langkah-langkah sistematis yang diambil untuk menyelesaikan setiap tahapan program, mulai dari pendataan pelanggar hingga penerimaan pembayaran denda secara digital. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan berlangsung dengan efisien, akurat, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Penerapan metode yang tepat dalam penyelesaian tugas yang cepat dan tepat akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan pembayaran pajak hiburan.

Metode penyelesaian pajak hiburan yang diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup efektif, meskipun beberapa penyesuaian perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Ini sesuai dengan teori Efektivitas menurut Siagian (Wijaya, 2020:18), yang menunjukkan bahwa indikator metode penyelesaian pekerjaan berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
  - a. Sarana dan Prasarana
  - b. Komunikasi dan Informasi yang Jelas
2. Faktor Penghambat
  - a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
  - b. Kurangnya Sosialisasi

## SIMPULAN

Metode dalam pemungutan pajak hiburan melibatkan pendekatan dan prosedur yang bertujuan memastikan kelancaran proses serta mengurangi potensi kebocoran pajak. Penggunaan metode yang tepat, seperti sistem elektronik, layanan terpadu, atau pendekatan langsung kepada pelaku usaha, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat pencapaian target pendapatan. Dalam hal sosialisasi, informasi yang jelas mengenai program pajak hiburan, termasuk manfaat, tata cara, dan langkah pembayaran digital, sangat penting disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial, brosur, spanduk, atau seminar. Namun, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kegiatan sosialisasi ini belum maksimal, sehingga memengaruhi efektivitas program. Selain itu, pengawasan juga menjadi bagian integral untuk memastikan pelaksanaan SOP, mengevaluasi kinerja petugas, dan menjaga keandalan sistem teknologi yang digunakan. Meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan usaha hiburan dan terbatasnya jumlah objek pajak terdaftar masih menjadi tantangan. Dalam aspek ini, teknologi diusulkan sebagai solusi untuk mempermudah proses pelaporan sekaligus meningkatkan partisipasi wajib pajak. Di sisi lain, metode penyelesaian pekerjaan yang diterapkan berfokus pada langkah-langkah sistematis, seperti pencatatan, pengolahan data secara digital, dan penerimaan pembayaran, untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai SOP. Meskipun penerapannya di Hulu Sungai Utara sudah cukup efektif, terdapat kebutuhan untuk penyesuaian terhadap kondisi lapangan guna mencapai hasil yang optimal. Dengan pendekatan ini, metode, sosialisasi, pengawasan, dan penyelesaian pekerjaan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas pemungutan pajak hiburan, sesuai teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian (Wijaya, 2020:18).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing
- Gainau, Maryam B. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Depok: PT. Kanisius
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Heri, Eko Indra. 2020. *Paradigma Baru Pengelolaan SDM Dalam Organisasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada